

Propam Pernah Nasihati Briptu Christy, tapi Ia Tetap Bandel dan Bolos Kerja

MANADO (IM) - Kasi Propam Polresta Manado AKP Arke Parasan mengungkap sudah pernah menasihati Briptu Christy supaya masuk tugas lagi. Namun polwan yang kini masuk DPO Polda Sulawesi Utara (Sulut) itu tetap bandel tak masuk kerja.

"Kita kasi nasihat datang ke kantor, faktanya ya dia (tetap) nggak masuk toh," kata AKP Arke kepada wartawan, Rabu (9/2). Menurut Arke, Briptu Christy dan suaminya, Briptu Reynaldy Kamae, sempat datang ke rumahnya untuk meminta nasihat. Arke mengatakan sudah memberi nasihat ke Briptu Christy sebagai atasan dan orang tua.

"Waktu datang di rumah, kebetulan kan suaminya kan teman anak saya. Jadi datang ke rumah untuk saya kasi nasihat sebagai orang tua toh, cuma itu (tetap bolos kerja)," kata Arke.

Arke mengatakan, saat datang ke rumahnya, Briptu Christy tidak melaporkan ada masalah di Polresta Manado sebagai instansi tempatnya bekerja. Arke menyebut masalah Briptu Christy saat itu murni meninggalkan tugas tanpa alasan yang jelas.

"Oh nggak, nggak ada. Setahu saya nggak ada (Briptu Christy) cerita ada masalah di instansi. Intinya, dia murni tidak masuk kerja," ungkap Arke.

Dikatakan Arke, Briptu Christy belum berstatus desersi saat datang ke rumahnya. Status desersi baru dikeluarkan setelah Briptu Christy tetap meninggalkan tugas

meski sudah diberi nasihat pada Desember 2021.

"Jadi sebelum turun status desersi (Briptu Christy dan suami) datang ke rumah Desember, awal kalau nggak salah," kata Arke.

Briptu Christy dilaporkan mulai meninggalkan tugas pada November 2021. Kondisi itu membuat Polda Sulut memasukkan Briptu Christy ke daftar pencarian orang (DPO).

Briptu Christy sempat dilaporkan terdeteksi di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). Namun penelusuran pihak kepolisian setempat belum membuahkan hasil.

Sementara itu, suami Briptu Christy, Briptu Reynaldy Kamae, mengaku tak punya masalah rumah tangga dengan istrinya yang kabur hingga dinyatakan DPO oleh Polda Sulut karena desersi itu. Briptu Reynaldy mengatakan kepergian istrinya karena ada masalah di instansi tempatnya bekerja.

Pengakuan Briptu Reynaldy itu langsung dibantah pihak Polresta Manado. Ditegaskan, tidak ada tekanan kerja yang diberikan kepada Briptu Christy.

"Ini tidak ada masalah instansi," kata AKP Arke, Rabu (9/2).

Menurut Arke, kasus Briptu Christy murni masalah desersi semata. Soal alasan Briptu Christy meninggalkan tugas bisa didalami jika Briptu Christy sudah tertangkap.

"Intinya kan dia nggak masuk-masuk kerja. Faktanya dia nggak masuk, toh," kata Arke. ■ lus



BURONAN KORUPSI PENGELOLAAN BELANJA

DAERAH SEKRETARIAT DPRD PALI

Petugas dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Sumatera Selatan mengginggirkan terpidana kasus tindak pidana korupsi pengelolaan belanja daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Penuk Abab Lematang Ilir (PALI) Tahun Anggaran 2017 Arif Firdaus (kedua kiri) saat tiba di Kejati Sumatera Selatan, Palembang, Rabu (9/2). Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung bersama Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dibantu AMC Kejaksaan Agung menangkap Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten PALI Arif Firdaus yang merupakan buronan sejak tahun 2020 terkait kasus korupsi pengelolaan belanja daerah Sekretariat DPRD Kabupaten PALI tahun anggaran 2017 senilai Rp6,116 miliar.

Mahfud: Polisi Bertindak Sesuai Prosedur saat Amankan Kericuhan di Desa Wadas

KAROLINA Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, sejumlah warga yang sempat diamankan saat ricuh di Desa Wadas, Jateng, telah dipulangkan ke keluarga.

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, pihak kepolisian sudah

bertindak sesuai prosedur saat mengamankan keributan yang terjadi di Desa Wadas, Kabu-

paten Purworejo, Jawa Tengah.

"Saat ini kita proses cooling down dulu. Polisi sudah bertindak sesuai prosedur untuk menjamin keamanan masyarakat," ungkap Mahfud dalam keterangannya, Rabu (9/2).

Mahfud juga memastikan, dalam permasalahan tersebut tidak ada kekerasan. Bahkan, penembakan pun juga tidak ada.

"Tidak ada kekerasan dari

aparatus, tidak ada penembakan," jelasnya.

Dia mengatakan, polisi menjalankan tugasnya guna menjaga masyarakat agar tak terlibat konflik horizontal. Polisi juga telah berupaya menjaga masyarakat agar tidak saling terprovokasi.

"Polisi bertindak atas permintaan untuk pengawasan dan menjaga masyarakat agar tidak terjebak konflik horizontal dan terprovokasi antar sesama masyarakat," katanya.

Mahfud menyampaikan jajaran Kemendo Polhukam akan menggelar rapat koordinasi (Rakor) untuk membahas persoalan Wadas nanti sore. Informasi lebih lanjut akan disampaikan olehnya selepas rakor.

"Nanti sore saya rakor polhukam jam 15.00. Baru akan saya beri keterangan," tutunya.

Saat mengamankan keributan tersebut, polisi sempat mengamankan puluhan warga Desa Wadas lantaran dianggap bertindak anarkis sambil membawa senjata tajam menghalangi petugas saat melakukan pengukuran lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener, Seasa (8/2).

Namun menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan, semuanya dikembalikan ke keluarga.

"Kondisi saat ini seluruh warga yang diamankan sudah dikembalikan semuanya kepada keluarganya," kata Ramadhan, dikutip dari Youtube Divisi Humas Polri, Rabu (9/2).

Ramadhan juga mengatakan, dari puluhan warga yang sempat diamankan, polisi menemukan satu warga yang positif Covid-19.

"Didapat 1 warga yang terkonfirmasi covid sehingga menjalani isolasi terpusat," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Kuasa hukum warga Desa Wadas, Julian Dwi Prasetya mengatakan, sebanyak 64 warga yang ditangkap oleh

pihak kepolisian Polres Purworejo. Julian menyebut saat ini pihaknya telah mendapatkan kuasa dari mayoritas warga yang ditangkap.

"Iya 64 orang (ditangkap), dan yang sudah kasih kuasa ke kami 54 orang," katanya.

Wakapolda Jateng, Brigjen Abioso Seno Aji, sebelumnya mengatakan, sejumlah warga diamankan lantaran bertindak anarkis dan menghalangi petugas yang melakukan pengukuran lahan untuk pembangunan proyek Bendungan Bener, Seasa (8/2).

Seluruh warga yang diamankan dibawa ke Polsek Bener untuk proses interogasi. Selama proses pengukuran lahan terjadi ketegangan antara kelompok masyarakat yang pro dan kontra terhadap kegiatan tersebut. Beberapa yang diamankan disebut membawa senjata tajam.

Pengarahan aparat kepolisian itu disebut polisi berdasarkan permintaan dari tim BPN dan Dinas Pertanian untuk membantu pengamanan selama proses pengukuran lahan.

Penerjunan personel dilakukan berdasarkan Surat Kementerian PUPR No: UM 0401.ag.3.4./45 tertanggal 3 Februari 2022 tentang permohonan pelaksanaan pengukuran di Desa Wadas dan surat dari Kementerian ATR/BPN Kabupaten Purworejo No: AT.02.02/344-33.06/ii/2022 tertanggal 4 Februari 2022.

"Namun ada masyarakat setempat yang menolak proyek tersebut sehingga timbul ketegangan ketika aparat mendatangi lokasi," ujar Wakapolda.

Staf Divisi Kampanye dan Jaringan LBH Yogyakarta Dhanil Al Ghifary mengatakan bahwa pengerahan pasukan kepolisian itu dilakukan untuk melakukan penyisiran desa dan menurunkan banner protes warga yang menolak tambang batu di sana.

Dia menyebut ada ribuan aparat kepolisian yang masuk ke desa membawa senjata lengkap. ■ lus

Kapolri Minta Seluruh Jajarannya Siapkan Strategi Khusus Antisipasi Lonjakan Covid-19

JAKARTA (IM) - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan kegiatan akselerasi vaksinasi serentak di seluruh wilayah Indonesia dengan hadir secara langsung di Bintan, Kepulauan Riau (Kepri). Listyo meminta seluruh jajarannya melalui sambungan virtual untuk menyiapkan strategi-strategi khusus guna mengantisipasi serta menghadapi lonjakan pertumbuhan Covid-19 yang disebabkan oleh varian Omicron.

"Sehingga tentunya kita harus melakukan langkah-langkah sebagai upaya menghadapi varian Omicron. Salah satunya yang paling prioritas adalah bagaimana kita melakukan akselerasi vaksinasi," kata Sigit dalam arahannya kepada jajarannya diseluruh wilayah Indonesia, Rabu (9/2).

Strategi pertama yang harus dioptimalkan, kata Sigit adalah terus melakukan akselerasi percepatan vaksinasi. Khususnya, bagi kelompok lanjut usia (lansia). Serta masyarakat yang sudah mendapatkan vaksin dosis dua namun telah memasuki atau melewati enam bulan, untuk segera mendapatkan suntikan booster atau dosis ketiga.

"Dan tentunya dalam kesempatan ini saya kembali mengingatkan dengan me-

ningkatnya varian Omicron tentunya yang harus kita lakukan kemudian strategi-strategi. Sehingga kita bisa melakukan vaksinasi di wilayah terjaluh. Dan tentunya ini perlu adanya kerjasama, strategi khusus," ujar mantan Kapolda Banten ini.

Strategi kedua, kata Listyot, adalah terus mengingatkan dan mensosialisasikan kepada masyarakat untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes) dalam menjalani aktivitas sehari-harinya.

"Kedua adalah ingatkan masyarakat kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Karena hal itu salah satunya yang paling utama memakai masker," ucap eks Kabareskrim Polri itu.

Menurut mantan Kabareskrim Polri itu, terjadinya transmisi penularan kerap diakibatkan lantaran ketidakdisiplinan dalam penggunaan masker. Hal itu penting, sambung Sigit, lantaran varian Omicron memiliki tingkat penularan yang lebih cepat walaupun tingkat fatalitas lebih rendah dibandingkan varian Delta.

"Namun demikian manakala kemudian ini menular kemudian masuk kepada usia-usia rentan apalagi belum vaksin dan komorbid ini juga tetap menimbulkan fatalitas. Karena

itu, mari kita saling mengingatkan untuk tetap pakai masker. Bila perlu pakai masker double utamanya di tempat yang ada aktivitas kerumunan. Ini untuk menjaga agar masyarakat semua bisa terhindar dari penularan," ujarnya.

Sedangkan strategi yang terakhir, menurut Sigit adalah sinergitas dan soliditas antara Pemerintah Pusat, TNI-Polri Pemerintah Daerah, dan seluruh elemen masyarakat untuk terus bekerjasama dan bahu-membahu dalam rangka penanganan dan pengendalian Pandemi Covid-19.

Ia berharap, seluruh pihak terkait yang berada di lini terdepan, untuk tidak lelah mengingatkan kepada masyarakat khususnya yang belum mendapatkan vaksin untuk segera melakukan vaksinasi. Hal itu guna meningkatkan imunitas bagi varian virus Covid-19.

"Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat, daerah dan seluruh stakeholder tentunya terus siapkan gerai vaksin dan strategi vaksinasi. Dan tentunya mari kita ingatkan pada saudara-saudara untuk memanfaatkan gerai tersebut. Khususnya bagi yang belum vaksin, atau yang sudah waktunya booster enam bulan harus dilakukan vaksinasi kembali," kata Listyo. ■ lus



IDN/ANTARA

TEMUAN TANAMAN MIRIP GANJA DI GOWA Kasi Humas Polres Gowa AKP Mangatas Tambunan (kedua kiri) memperlihatkan tanaman diduga ganja saat rilis di kantor Polres Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Rabu (9/2). Tanaman dengan tinggi batang sepanjang satu meter tersebut ditemukan warga di kebun belakang rumahnya dengan kondisi siap tanam.

Polda Sumut Bakal Periksa Bupati Langkat soal Kerangkeng Manusia di Rumahnya

MEDAN (IM) - Polda Sumatera Utara (Sumut) bakal memeriksa Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin, terkait kerangkeng manusia yang ada di rumahnya.

Selain Terbit, polisi tak menutup kemungkinan untuk memeriksa pihak-pihak lain yang terkait kasus tersebut.

"Tunggu saja, termasuk melakukan pemeriksaan kepada siapapun yang kita butuhkan untuk memberikan keterangan terkait dengan perkara itu," kata Kapolda Sumut, Irien Panca Putra, kepada wartawan, Rabu (9/2).

"Termasuk siapa pun. Termasuk eks bupati (Bupati Langkat nonaktif)," kata Panca.

Panca mengaku telah berkoordinasi dengan KPK. Panca pun menjelaskan proses yang tengah dilakukan oleh pihaknya.

"Saya dari pertama sudah koordinasi dengan KPK. Langkah penyelidikan itu mulai dari penyelidikan, baru naik ke penyelidikan ditentukan perkara itu pantas nggak naik untuk disidik. Setelah itu, baru ditentukan siapa tersangkanya, penetapan tersangkanya. Baru nanti penyelesaian berkas perkara. Itu tahapan inti yang umum," katanya.

Panca meminta masyarakat bersabar. Jika nanti perkara telah naik ke penyelidikan, petugas bakal menentukan tersangkanya.

"Jadi percaya kalau sudah naik penyelidikan pasti nanti harus kita cari tentukan siapa tersangkanya. Sekali lagi, tersangka teman-teman keluarga saya tidak menutup kemungkinan ada orang lain yang terlibat. Saya harus sam-

paikan. Tidak hanya orang yang mengakibatkan orang terjadinya meninggal dunia atau dianiaya, tetapi siapa pun yang berkaitan dengan kejadian tersebut yang patut diminta pertanggungjawabannya kita akan proses," sebut Panca.

Hingga saat ini polisi telah memeriksa 63 sebagai saksi terkait kasus kerangkeng manusia itu.

"Yang jelas tim sudah memeriksa sampai saat ini kurang lebih ada 63 saksi," sebut Panca.

Panca juga mengatakan ada enam orang korban yang diperiksa. Petugas mendapati adanya tanda penganiayaan dan juga cacat. "Enam ada tanda penganiayaan sama cacat," sebut Panca.

Seperti diketahui, informasi terkait adanya kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin ini mulai diketahui saat KPK melakukan penggeledahan terkait kasus suap. Migrant Care yang mendapatkan informasi terkait hal ini kemudian membuat laporan ke Komnas HAM.

LPSK yang turut mengali informasi terkait hal ini menemukan dugaan adanya penghuni yang tewas karena dianiaya dalam kerangkeng itu.

Selain itu, mereka mengumumkan adanya pembatasan terhadap penghuni untuk beribadah. Terbit Rencana kini ditahan KPK. Dia telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap. Terbit Rencana diduga meminta fee dari paket-paket yang dibuat terkait pengerjaan proyek. ■ lus



IDN/ANT

PROGRAM BANK SAMPAH WARUNG MEN SAMPIK Anggota Polisi Polres Badung bersama petugas pengelolaan sampah menimbang sampah plastik saat peluncuran program Warung Men Sampik (Warga Beruntung Menabung Sampah Plastik) di Subak Tungku, Desa Mengwi, Badung, Bali, Rabu (9/2). Polres Badung bekerja sama dengan Bali Waste Cycle (BWC) membuat program bank sampah di desa-desa untuk mengatasi masalah sampah plastik sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta menjadikannya barang berharga dan bernilai ekonomis dengan tujuan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari pada masa pandemi COVID-19 dengan memanfaatkan hasil tabungan sampah plastik.

Diduga karena Sering Dimarahi, Suami Bunuh Istri di Tangerang

TANGERANG (IM) - Pria berinisial N (56), warga Kampung Gempolsari, Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang, membunuh istrinya NW (54) Selasa (8/2). Motifnya diduga dendam karena N sering dimarahi istrinya. Menurut pengakuan awal karena (N) sering dimarahi (oleh NW)," ujar Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Komarudin, melalui rekaman yang diterima wartawan, Rabu (9/2).

Meski pelaku sudah mengakui perbuatannya, Komarudin mengatakan, pihaknya masih melakukan pendalaman anjutan terkait motif pelaku. Saat ini, N masih menjalani perawatan dan belum bisa dimintai keterangan secara lengkap.

"(Motif) masih kami dalam karena saat ini terduga pelaku masih belum dimintai keterangan, karena sedang menjalani pengobatan," papar Komarudin.

Pembunuhan itu terjadi bermula saat N dan NW cek-cek di rumah mereka, sekitar

pukul 18.30 WIB. Tiba-tiba terdengar teriakan NW minta tolong. Tak berselang lama, keponakannya yang tinggal bersebelahan menghampiri keadilan NW. Saat dihampiri, percekocokan sudah memanask. Keponakan NW kemudian meninggalkan lokasi dan meminta bantuan warga setempat.

Menurut Komarudin, di tengah cecokan, N mengambil pisau dan menusuk NW. Lantas NW berusaha melawan. Dia mengambil pisau yang dipegang oleh suaminya. N lantas mengambil sebuah golok dan membacok NW.

Komarudin menduga, NW sempat menahan serangan dari N. Akibatnya, N juga mengalami luka-luka.

"Kalau dilihat dari luka-luka pelaku, sepertinya memang karena bekas tangkisan korban, karena memang kejadian berada di ruang yang cukup sempit," tutur Komarudin. "Begitu warga datang, kondisinya sama-sama terkapar," kata Komarudin menambahkan. ■ lus